

IMPLEMENTASI INOVASI SISTEM INFORMASI LAYANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (SILAT) DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN BLORA

Dimas Junian Fadillah^{1)*}, Augustin Rina Herawati²⁾.

¹**Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia**
dimasjunian5@gmail.com

²**Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia**
augustinrina@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi inovasi Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT) sebagai platform *e-Government* yang mendukung program pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Analisis penelitian berpedoman pada tiga elemen sukses *e-Government* dari JFK Harvard School of Government, yaitu dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan manfaat (*value*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dukungan regulatif dan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sudah dilakukan, masih terdapat beberapa hambatan sehingga belum mencapai target yang ditetapkan, khususnya dalam aspek responsivitas penanganan bagi penerima manfaat layanan. Kelemahan tersebut memengaruhi optimalisasi peran inovasi SILAT dalam percepatan identifikasi serta penanganan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan inovasi digital sangat bergantung pada kepastian layanan yang ditopang oleh regulasi yang kuat, kapasitas sumber daya yang memadai, dan penciptaan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga implementasi inovasi dapat berhasil dan berjalan efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang lebih luas mengenai implementasi inovasi *e-Government* di tingkat daerah, khususnya dalam konteks percepatan pengentasan ATS di Kabupaten Blora.

Kata kunci: implementasi inovasi, *e-Government*, anak tidak sekolah, pelayanan publik

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Out-of-School Children Service Information System (SILAT) as an e-Government innovation supporting the program for addressing Out-of-School Children (ATS) in Blora Regency. The research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analysis is guided by the three elements of successful e-Government proposed by the JFK Harvard School of Government, namely support, capacity, and value. The findings indicate that although regulatory support and efforts to enhance human resource capacity have been carried out, several obstacles remain, preventing the program from achieving its intended targets. These challenges are particularly evident in the responsiveness of services provided to beneficiaries, which affects the optimal role of the SILAT innovation in accelerating the identification and handling of Out-of-School Children. This study concludes that the successful implementation of digital innovation depends on service certainty supported by strong regulations, adequate resource capacity, and the creation of tangible public value. Effective fulfillment of these elements enables innovations to operate efficiently. The research contributes to broader academic discussions on the



implementation of e-Government innovations at the regional level, especially in the context of accelerating efforts to address Out-of-School Children in Blora Regency.

Keywords: innovation implementation, e-Government, out-of-school children, public service

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang kompeten, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kerangka regulatif tersebut mewajibkan negara menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan perluasan program Wajib Belajar menjadi 13 tahun melalui RPJMN 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 sebagai langkah untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar masih menghadapi tantangan. Kondisi ini juga berdampak langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah serta melemahkan kontribusi Indonesia terhadap target *Sustainable Development Goals* (SDG 4) yang menekankan jaminan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun menjadi salah satu indikasi bahwa tujuan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Anak yang tidak bersekolah umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, keterbatasan sarana pendidikan, dan kondisi psikologis peserta didik (Rahmawati, 2024). Data Badan Pusat Statistik periode 2020–2023 menunjukkan persentase ATS berkisar antara 28,89% hingga 30,22%, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan konsisten.

Pemerintah Kabupaten Blora berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan inovasi berbasis *e-Government* pada sektor pendidikan. Pemanfaatan *e-Government* memungkinkan terbentuknya layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan responsif berkat dukungan teknologi informasi (Rachmatullah, N., & Purwani, 2022). Teknologi juga berpotensi meningkatkan kualitas interaksi layanan dan kepuasan masyarakat (Russo, 2014).

Inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemkab Blora adalah Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT), sebuah platform berbasis web yang dirancang guna melengkapi keterbatasan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem Dapodik awalnya hanya mencatat peserta didik yang telah terdaftar di sekolah, sehingga anak yang belum pernah bersekolah tidak tercatat secara memadai. Aplikasi SILAT dikembangkan untuk menyediakan mekanisme pendataan terpadu terhadap Anak Belum Pernah Sekolah dan ATS melalui integrasi data dari Dapodik Kementerian Pendidikan, EMIS Kementerian Agama, serta data dari Kementerian Sosial dan Dukcapil.

Pengembangan inovasi SILAT memiliki legitimasi hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Blora Nomor 89 Tahun 2021 mengenai Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk merancang, menerapkan, dan mendiseminasi inovasi pelayanan publik berbasis teknologi secara terstruktur dan berkelanjutan. Capaian indikator pendidikan setelah penerapan SILAT yang telah dilaksanakan sejak 2023 menunjukkan perubahan yang belum signifikan.

Dilihat dari capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah pada 2024 tercatat 8,02 tahun dan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 8,85 tahun. Kabupaten Blora bahkan hanya mencatat RLS sebesar 7,26 tahun, yang memperlihatkan masih adanya ketimpangan capaian pendidikan dasar. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Blora masih memerlukan penguatan meskipun telah tersedia instrumen teknologi dan landasan regulatif yang mendukung pengentasan jumlah ATS. Hingga saat ini, aplikasi SILAT telah mencatat sekitar 10.827 pengguna dan 2.265 instansi terdaftar, yang mencerminkan perluasan jangkauan kelembagaan serta kesiapan administratif sistem. Meskipun demikian, log akses aplikasi masih menunjukkan angka nol, yang mengindikasikan bahwa implementasi operasional di tingkat sekolah dan desa belum berjalan dengan maksimal. Akses input data yang terbatas pada operator desa dan tenaga pendidik di sekolah juga menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur penunjang untuk memastikan pemanfaatan sistem inovasi SILAT dapat optimal.

Berbagai penelitian mengenai implementasi inovasi layanan publik berbasis teknologi menunjukkan beragam temuan. Penelitian tentang penerapan layanan digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Data Desa dan Pelayanan Online) di Kabupaten Jombang menemukan bahwa keberadaan dasar hukum saja tidak menjamin keberhasilan implementasi inovasi. Keberhasilan inovasi digital masih memerlukan dukungan operasional yang mencakup kesiapan infrastruktur serta pelaksanaan sosialisasi yang memadai agar layanan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas (Nur Laila, F. D., & Habibi, 2024).

Penelitian lain tentang analisis implementasi inovasi berbasis aplikasi Klampid New Generation di Kelurahan Wonokromo. Penelitian tersebut menggunakan teori indikator implementasi oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program berjalan dengan baik sesuai dengan indikator implementasi. Kunci keberhasilan dari inovasi tersebut pada komunikasi sosialisasi berjalan dengan baik, sumber daya yang memadai, dan struktur birokrasi yang tertata (Mochammad Rozikin, 2020).

Sebagian besar kajian mengenai implementasi inovasi di Indonesia lebih menitikberatkan pada layanan publik umum, sehingga pembahasan terkait inovasi pada sektor pendidikan yang diarahkan untuk mendukung penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di tingkat kabupaten belum banyak mendapat perhatian akademik. Keterbatasan literatur tersebut menunjukkan perlunya studi yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi inovasi pendidikan di Kabupaten Blora telebih pemerintah daerah menargetkan capaian *zero* ATS yang termuat dalam RPJPD 2025–2045.

Penulis tertarik untuk menganalisis implementasi inovasi Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) dalam mendukung pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora dengan menggunakan kerangka elemen sukses *e-Government* dari JFK Harvard School of Government, yang mencakup dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan manfaat (*value*). Analisis terhadap ketiga elemen tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi inovasi SILAT serta dinamika faktor penghambatnya, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi pada penguatan praktik inovasi *e-Government* di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan desain yang banyak digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman informan secara mendalam Raskind et al, (2019) dan berfokus pada perspektif, pengalaman, serta perilaku para responden dalam suatu kajian (Schmieder, 2020). Meskipun beberapa prosesnya memiliki kemiripan dengan penelitian kuantitatif, seperti pengumpulan dan analisis data, perbedaannya terletak pada cara menggali informasi secara lebih intensif dan mendalam dari subjek penelitian (Turner, D., Ting, H., Lim, T. Y., & Tan, 2021). Penelitian kualitatif deskriptif secara umum berfokus memberikan gambaran rinci tentang situasi, sikap, serta sudut pandang yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama di lokasi penelitian (Saat, S., & Mania, 2020), yaitu kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari publikasi tertulis seperti jurnal, undang-undang, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian mengenai penerapan aplikasi SILAT (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara individu digunakan untuk menggali persepsi personal dari informan, sedangkan wawancara kelompok dapat mengungkap norma atau pandangan bersama (Moolman, B., et al., 2023). Observasi langsung membantu peneliti memahami perilaku responden secara kontekstual, sementara dokumen dianalisis untuk menemukan pola dan informasi yang sesuai kebutuhan penelitian (Mahmudah, F. N., et., al, 2022). Teknik-teknik ini sejalan dengan pandangan bahwa data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen (Mataji Amirroud, M., etal., 2023), dan kualitas penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam menggali data, bukan sekadar banyaknya responden.

Informan dalam penelitian ini meliputi: (1) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, (2) Perangkat Desa Klopoduwur selaku operator SILAT, dan (3) Warga Desa Klopoduwur sebagai pengguna layanan SILAT. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan empat tahapan dalam model analisis data interaktif Miles dan Huberman (1992:20), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan 88asyarakat atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Layanan Digital SILAT

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kebutuhan fundamental yang harus terus diupayakan sebagai tolak ukur optimalisasi kinerja pemerintahan (Prabowo dkk, 2022). Hal tersebut di dukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendorong efisiensi serta efektivitas kinerja birokrasi. Inovasi dalam pelayanan publik dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kebaruan, baik berupa ide maupun bentuk produk yang bersifat material ataupun nonmaterial, yang ditujukan untuk memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan individu maupun organisasi (Triyono, 2025). Pemaknaan ini menegaskan bahwa esensi inovasi terletak pada kemampuan menghadirkan pembaruan yang berfungsi memecahkan persoalan secara lebih efektif daripada pendekatan sebelumnya.

Pemerintah di berbagai level, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk menghadirkan inovasi sebagai strategi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep inovasi layanan mencakup proses pengenalan layanan baru maupun perbaikan layanan yang dilakukan secara bertahap (Tseng, 2018). Inovasi dalam sektor pelayanan publik pada hakikatnya merupakan terobosan yang menghadirkan ide kreatif, baik yang bersifat orisinal maupun hasil adaptasi atau modifikasi, dengan tujuan memberikan manfaat nyata maupun tidak langsung bagi penduduk (Prabowo, 2022).

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mulai mengembangkan inovasi layanan berbasis digital melalui Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT). Implementasi SILAT merepresentasikan transformasi administratif dari pola pelayanan konvensional menuju sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan adaptif. Pengembangan layanan digital ini tidak semata-mata ditujukan untuk mempercepat proses administrasi di bidang pendidikan, tetapi juga bertujuan meningkatkan ketepatan data, memperkuat transparansi, serta memperluas jangkauan akses bagi pengguna layanan di bidang pendidikan agar lebih mudah, cepat, dan terstandar. Keberadaan aplikasi SILAT sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung reformasi birokrasi serta peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Tampilan beranda SILAT

Sumber: <http://dinaspendidikan.blorakab.go.id/>

Gambar 1 merupakan tampilan beranda aplikasi SILAT. Inovasi layanan ini menerapkan sistem integrasi berbasis data kependudukan yang memanfaatkan Basis Data Terpadu Pendidikan, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdiknasmen RI dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama, yang kemudian disinergikan dengan data milik Kementerian Sosial dan Dukcapil. Integrasi ini memungkinkan proses identifikasi dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan secara lebih efektif dan efisien melalui ketersediaan data yang komprehensif dan tervalidasi. Seluruh data tersebut dimanfaatkan dalam proses verifikasi, penanganan kasus, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terkait ATS.

Prosedur pemanfaatan layanan SILAT diawali dengan mengakses portal resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora pada laman <https://dinaspendidikan.blorakab.go.id/>. Pengguna kemudian diperlihatkan daftar 16 kecamatan beserta desa-desa yang berada di Kabupaten Blora. Masyarakat dapat memilih kecamatan dan desa sesuai domisili untuk melihat informasi layanan yang tersedia. Kewenangan untuk melakukan perubahan atau penambahan data Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak diberikan kepada pengguna umum, melainkan hanya kepada operator resmi, yaitu perangkat desa atau pihak sekolah yang telah ditetapkan pada masing-masing kecamatan. Pengaturan tersebut diterapkan guna menjamin keakuratan, keamanan, serta konsistensi data yang dikelola dalam sistem layanan SILAT.

Aplikasi SILAT juga dilengkapi dengan sejumlah fitur utama yang mendukung pengelolaan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Blora. Fitur Pelayanan Dinas Pendidikan (Disdik) menyediakan layanan administrasi dan informasi, seperti pengaduan, permohonan informasi, serta layanan administratif lainnya, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kepuasan pengguna.

Fitur Sekretariat mencakup kebutuhan administratif, antara lain legalisasi ijazah, pengurusan mutasi atau pindah sekolah, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring, serta penyediaan informasi terkait data pendidikan dan Anak Tidak Sekolah (ATS). Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) menyajikan informasi mengenai satuan pendidikan dasar, meliputi data sekolah dan peserta didik, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang SD dan SMP.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan Dikmas) bertugas mengelola data satuan PAUD, pendidikan nonformal, serta sekolah khusus sebagai upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) difokuskan pada pengelolaan data pendidik, termasuk Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan profil guru, yang menjadi komponen penting dalam perencanaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Terakhir, Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) menyediakan informasi terkait infrastruktur pendidikan, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang SD dan SMP.

Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Layanan Digital SILAT di Kabupaten Blora

Keberhasilan penerapan *e-government* pada instansi pemerintah sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan terarah. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard JFK School of Government mengidentifikasi tiga komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi *e-government*, yaitu dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), serta nilai atau manfaat yang dihasilkan (*value*) (Indrajit, 2006). Mengacu pada temuan tersebut, analisis berikut menyajikan kajian mengenai pelaksanaan inovasi layanan digital SILAT dengan menggunakan kerangka teori keberhasilan implementasi *e-government* menurut Harvard JFK School of Government.

Dukungan (*Support*)

Dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan pemerintah desa, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan Aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Blora. Inovasi ini dikembangkan sebagai langkah strategis untuk menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemanfaatan data terintegrasi serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan pihak sekolah dalam proses pendataan dan intervensi. Mengacu pada kerangka analisis Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2006), dukungan mencakup tiga aspek utama, yakni kemauan politik (*political will*), ketersediaan infrastruktur, dan pelaksanaan sosialisasi yang terencana sebagai bagian dari penguatan implementasi program.

A. *Political Will* (Kemauan Politik)

Dukungan Pemerintah Kabupaten Blora terhadap implementasi SILAT diwujudkan melalui pengarahan resmi kepada seluruh perangkat desa, pendidik, serta pemangku kepentingan terkait agar secara aktif melaporkan kepada Dinas Pendidikan apabila menemukan anak usia sekolah yang berpotensi atau telah mengalami putus sekolah. Para guru dan operator desa juga diminta melakukan pendataan di lingkungan masing-masing serta mengajak anak yang tidak bersekolah untuk kembali mengakses pendidikan melalui fasilitas yang disediakan dalam inovasi SILAT. Keberhasilan penyelenggaraan SILAT di Kabupaten Blora tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pengarah dan pengendali kebijakan, sekaligus pemimpin yang memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hendry Mintzberg dalam Thoha (2007) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin menjalankan fungsi hubungan interpersonal melalui aktivitas memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan pihak yang dipimpinnya. Dinas Pendidikan sebagai institusi penggerak inovasi SILAT menjelaskan bahwa setiap desa telah disediakan akses dan ruang dalam sistem untuk mengelola data sesuai kebutuhan. Pemerintah desa hanya perlu menyiapkan dan menugaskan operator yang memiliki kompetensi teknologi informasi agar pengelolaan data dapat berjalan optimal.

Dukungan lain yang memperkuat implementasi SILAT adalah keberadaan landasan hukum yang jelas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan *e-government*, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 17).
4. Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Blora bersama Dinas Pendidikan terus melakukan pengembangan sistem SILAT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Dari sisi *political will* atau kemauan politik, implementasi inovasi SILAT telah berjalan dengan baik. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan SILAT tercermin dari adanya kesepakatan untuk menerapkan kerangka *e-government* melalui pemanfaatan inovasi teknologi di Kabupaten Blora. Pelaksanaan SILAT juga didukung oleh regulasi yang relevan di tingkat nasional maupun daerah, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, sehingga menjadikan inovasi ini sebagai instrumen strategis untuk memperkuat layanan pendidikan dan mendukung pengentasan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara berkelanjutan.

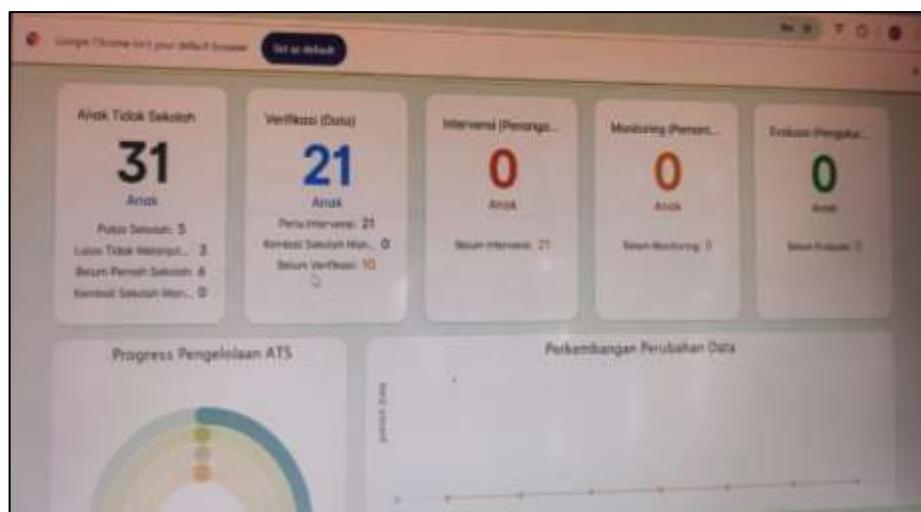
B. Infrastruktur

Infrastruktur mencakup sarana dan prasarana yang berperan penting dalam implementasi SILAT, termasuk komputer dan jaringan internet. Penerapan dan pengembangan *E-government* menuntut dukungan teknologi yang andal dan memadai di setiap unit kerja, yang meliputi pengalaman penggunaan komputer, jumlah komputer yang tersedia, serta ketersediaan jaringan internet dan server (Habibullah, 2010). Keberhasilan SILAT dalam mempermudah layanan kepada masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan akses internet. Efektivitas sistem informasi pelayanan publik tidak akan optimal jika dukungan infrastruktur telekomunikasi tidak memadai, meskipun teknologi aplikasi sudah canggih (Al-Mamun & Hossain, 2021).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Klopoduwur, perangkat desa hanya menggunakan jaringan Wi-Fi kantor desa, sedangkan kegiatan sosialisasi dan input data ATS ke rumah warga masih mengandalkan kuota data pribadi. Fasilitas pendukung lainnya terdiri dari lima unit laptop dan satu printer, dan jumlah tersebut dinilai memadai untuk operasional pemerintahan desa. Masyarakat yang tidak memiliki smartphone tetap dapat mengakses layanan SILAT melalui perantara perangkat desa di balai desa. Observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa belum semua desa mampu menerapkan inovasi aplikasi SILAT secara optimal. Desa Klopoduwur, meskipun ditunjuk sebagai desa percontohan penerapan inovasi SILAT terbukti masih menghadapi keterbatasan anggaran, dukungan jaringan internet, serta ketersediaan smartphone penunjang bagi warga.

C. Sosialisasi dan Kontinuitas

Penyebaran informasi terkait layanan digital SILAT oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dilakukan secara bertahap melalui kegiatan sosialisasi. Kajian Harvard JFK School of Government yang dikutip dalam Indrajit (2006) menekankan bahwa sosialisasi terkait konsep *e-government* harus dilakukan secara merata, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan penerapannya di tingkat daerah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah daerah maupun warga memperoleh pemahaman yang cukup mengenai implementasi *e-government*. Bentuk sosialisasi dapat berupa pertemuan dengan kepala desa serta penyampaian informasi melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Blora.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SILAT milik operator Desa Klopoduwur

Sumber: Observasi penulis, 2025.

Gambar 2 menampilkan aplikasi SILAT yang hanya dapat diakses oleh operator desa. Berdasarkan temuan di lapangan, perangkat Desa Klopoduwur sebagai operator SILAT belum sepenuhnya mendapatkan sosialisasi dan pelatihan yang menyeluruh. Hal ini terlihat dari sejumlah aspek teknis aplikasi yang belum dipahami oleh operator, terutama karena antarmuka khusus operator lebih kompleks dan rinci dibandingkan versi yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Klopoduwur menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan aplikasi SILAT bagi perangkat desa sebagai operator masih terbatas, karena kegiatan tersebut baru dilakukan satu kali dan belum mencakup pendampingan teknis secara menyeluruh. Untuk mengatasi kendala teknis yang muncul pasca pelatihan, perangkat desa hanya diarahkan untuk berkonsultasi melalui media daring, sehingga upaya penguatan kapasitas operator di tingkat desa belum berjalan secara optimal.



Gambar Error! No text of specified style in document.. Pelatihan dan Sosialisasi SILAT dengan Operator Dapodik di Kabupaten Blora

Sumber: <https://dinaspendidikan.blorakab.go.id/home/>.

Gambar 3. menampilkan pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan yang ditujukan kepada guru dan pihak sekolah sebagai bagian dari strategi pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kegiatan ini berlangsung pada 9–10 Oktober 2024 di Hotel Loji Surakarta, dengan peserta meliputi seluruh koordinator Operator Dapodik jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Blora. Pelatihan tersebut tidak melibatkan operator desa sebagai pelaksana SILAT di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan frekuensi sosialisasi dan pelatihan agar implementasi SILAT dapat berjalan merata dan lebih efektif di seluruh desa

Kapasitas (Capacity)

Dimensi *capacity* merujuk pada kesiapan serta kecakapan institusional yang harus dimiliki pemerintah untuk mewujudkan implementasi *e-Government* secara efektif (Indrajit, 2006). Konsep kapasitas tersebut mencakup keseluruhan potensi yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah, baik dalam aspek teknis maupun manajerial, guna mendukung keberhasilan transformasi digital pada layanan publik. Sumber daya yang terlibat meliputi ketersediaan anggaran, kelayakan infrastruktur teknologi informasi, serta kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang memadai.

A. Anggaran

Ketersediaan sumber daya finansial yang memadai sangat penting bagi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *e-Government* (Indrajit, 2016:12). Keberadaan anggaran diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya lain, seperti infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menunjukkan bahwa pendanaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SILAT bersumber dari anggaran APBD. Informasi tersebut mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyediakan sumber daya finansial untuk mendukung operasional layanan digital. Ketersediaan dukungan anggaran yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi keberlanjutan inovasi *e-Government*, keterbatasan alokasi dana berpotensi menimbulkan stagnasi pengembangan aplikasi digital serta menurunkan mutu layanan yang dihasilkan (Meijer, A., & Bolívar, 2020).



B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam konteks ini dipahami sebagai pegawai atau pelaksana teknis yang memiliki kompetensi serta keahlian yang relevan untuk mengoperasikan sistem digital yang dikembangkan pemerintah (Indrajit, 2006). Ketersediaan SDM yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi *e-Government*, termasuk pada sektor pendidikan, karena keterbatasan kapasitas SDM akan menjadi penghambat tercapainya tujuan dari sebuah inovasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah membangun pola kolaboratif lintas sektor untuk memenuhi kebutuhan SDM pelaksana. Pola tersebut tercermin dalam keterlibatan Tim Serdadu (Koordinator Operator Dapodik), sekolah, dan perangkat desa sebagai operator utama yang memiliki akses langsung terhadap aplikasi SILAT. Sistem ini memungkinkan proses pengisian serta validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga pada tingkat pemerintahan desa yang memiliki kedekatan lebih kuat dengan kondisi sosial penduduk lokal. Informasi hasil wawancara mengindikasikan adanya perbedaan peran operator SILAT ke dalam dua kategori, yaitu operator sekolah yang berasal dari satuan pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, dan SMA, serta operator lapangan yang berada di desa dan bertanggung jawab terhadap pendataan berbasis wilayah administratif. Kedua kategori tersebut berfungsi saling melengkapi untuk memastikan akurasi dan validitas data ATS.

Berdasarkan uraian hasil di atas, implementasi SILAT di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan SDM pelaksana telah dikelola melalui pola kolaboratif lintas sektor yang melibatkan sekolah, Tim Serdadu, dan perangkat desa. Struktur pembagian peran antara operator sekolah dan operator lapangan memperkuat akurasi serta validitas pendataan ATS, sehingga mekanisme operasional aplikasi dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi sosial di tingkat lokal. Hambatan tetap muncul pada aspek penguatan kapasitas SDM, khususnya terkait jadwal pelatihan dan sosialisasi yang belum terlaksana secara periodik, sehingga peningkatan kompetensi operator memerlukan perhatian lebih untuk menjaga konsistensi dan kualitas implementasi SILAT.

Nilai (*Value*)

Pengembangan *e-Government* pada dimensi *support* dan *capacity* menunjukkan peran strategis pemerintah sebagai aktor utama dalam penyediaan infrastruktur, regulasi, dan layanan publik berbasis teknologi informasi, sebagaimana dijelaskan oleh Indrajit, (2006). Pemerintah berposisi pada sisi penyedia (*supply side*) dengan tanggung jawab menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan. Keberhasilan dan dampak *e-Government* tidak cukup diukur dari perspektif penyelenggara layanan, tetapi perlu dianalisis dari sisi pengguna atau penerima layanan, yaitu warga lokal dan pemangku kepentingan (*demand side*). Pemahaman terhadap manfaat Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT) sebagai salah satu inisiatif *e-Government* memerlukan pendekatan evaluatif yang menitikberatkan pada pengalaman, kepuasan, serta persepsi warga sebagai penerima manfaat utama layanan tersebut

Pemahaman terhadap manfaat Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT) sebagai salah satu inisiatif *e-Government* memerlukan pendekatan evaluatif yang menitikberatkan pada pengalaman, kepuasan, serta persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat utama layanan tersebut.

A. Kehadiran Komunikasi Interaktif Antara Lembaga Publik dan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SILAT berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai sarana kolaboratif antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, sekolah, dan lembaga pendidikan non-formal. Sistem ini memungkinkan pertukaran data ATS yang lebih cepat dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor juga tercermin dari peran aktif pemerintah desa dalam menyampaikan data anak tidak sekolah dan memfasilitasi koordinasi dengan dinas serta masyarakat.

Dalam penerapannya, sistem *e-government* pada dasarnya berlandaskan pada pemanfaatan teknologi informasi berbasis jaringan internet yang memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih efisien, serta pada pembentukan pola tata kelola pemerintahan baru yang lebih modern dan terintegrasi. Kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital yang terarah (Muliawaty, L., & Hendryawan, 2020). Mekanisme tersebut meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah, mempercepat tindak lanjut kebijakan, dan memperkuat keterlibatan semua pihak dalam upaya pengentasan ATS.

B. Mewujudkan Pelayanan yang Efisien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Layanan Administrasi Terpadu Pendidikan (SILAT) di Kabupaten Blora tidak hanya mendorong terjalannya komunikasi interaktif antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien. Efisiensi tersebut tercapai melalui pemanfaatan teknologi digital yang menjadi inti inovasi SILAT, sehingga ketergantungan pada prosedur manual berkurang dan proses administrasi dapat dilakukan lebih cepat.

Digitalisasi dalam SILAT memungkinkan masyarakat melaporkan keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara langsung melalui operator desa atau pihak sekolah secara daring. Mekanisme ini secara substansial menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat maupun pihak penyedia layanan. Sistem ini juga mendorong pola kerja yang lebih responsif dari aparatur pemerintah, karena pengaduan, permintaan informasi, maupun kebutuhan administratif dapat segera ditindaklanjuti melalui platform digital.

Observasi peneliti menemukan bahwa SILAT mampu mereformulasi mekanisme pelayanan publik menjadi lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat, khususnya terkait pengentasan ATS. Sistem ini memperkuat koordinasi dan integrasi antarlembaga di tingkat desa maupun kabupaten melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga koneksi antarlevel pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan. Keberadaan SILAT tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem pelayanan pendidikan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkualitas.



C, Memberikan Pelayanan Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Terpadu Pendidikan (SILAT) memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan Anak Tidak Sekolah (ATS). Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai platform pelaporan dan komunikasi administratif, tetapi juga memungkinkan pengembalian ATS ke jalur pendidikan formal maupun nonformal secara lebih efektif.

Peningkatan kecepatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai layanan tersebut, yang tercermin melalui kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan publik secara optimal (Prihartono, 2023). Data Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mencatat hingga September 2024 sebanyak 4.000 ATS bisa kembali ke sekolah formal, sementara sekitar 1.000 ATS diarahkan ke pendidikan non-formal, seperti program Paket B dan C. Keberhasilan ini didukung oleh fitur *by name by address* yang mempermudah identifikasi, penanganan, dan pemantauan ATS, sekaligus mempercepat koordinasi antara pemerintah desa, sekolah, dan Dinas Pendidikan.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SILAT. Beberapa operator desa masih menghadapi keterbatasan teknis terkait koneksi internet, literasi digital, dan waktu pembaruan data. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap belum terjangkaunya 1.400 ATS oleh intervensi langsung, terutama mereka yang berdomisili di wilayah terpencil atau telah menikah. Proses tindak lanjut laporan dalam beberapa kasus memerlukan waktu lebih panjang akibat keterbatasan sumber daya serta belum optimalnya integrasi antarinstansi. Hasil tersebut menegaskan perlunya peningkatan kapasitas operator dan penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga agar pemanfaatan SILAT dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Hambatan dalam Penerapan Inovasi SILAT di Kabupaten Blora

Inovasi pada praktiknya tidak selalu berjalan mulus dan kerap menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat proses pengembangannya. Albury (2003) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghalang inovasi, yang dapat muncul pada konteks dan situasi tertentu.

A. Ketergantungan berlebih pada *High Performance*

Ketergantungan pada individu berprestasi atau *high performance* menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi SILAT di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi masih terpusat pada satu orang operator yang memiliki kompetensi teknis lebih tinggi dibandingkan perangkat desa lainnya. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dari Kaur Perencanaan Desa Klopoduwur yang menyatakan bahwa pelatihan hanya diberikan kepada satu perwakilan desa sehingga kemampuan teknis tidak tersebar merata. Situasi serupa juga terlihat di Desa Karangjati, di mana terjadi kekosongan operator yang memahami SILAT setelah pegawai sebelumnya beralih menjadi P3K dan digantikan oleh personel baru yang belum memiliki keterampilan terkait.

Fenomena tersebut menandai adanya potensi kehilangan kapasitas kelembagaan, terutama ketika inovasi bergantung pada figur individu tertentu. Mulgan dan Albury (2003) menjelaskan bahwa ketergantungan berlebih pada *high performance* dapat menghambat keberlanjutan inovasi karena organisasi tidak memiliki mekanisme pembelajaran yang terstruktur maupun sistem berbagi pengetahuan yang memadai.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa risiko tersebut menjadi penghambat pada implementasi SILAT, terlihat dari tidak adanya sistem internal yang memastikan transfer

pengetahuan ketika terjadi rotasi, mutasi, atau pergantian pegawai. Peran jumlah dan kompetensi SDM semakin menegaskan pentingnya kesiapan organisasi dalam mengelola inovasi. Cinar, E., Trott, P., & Simms (2019) menekankan bahwa kapasitas SDM dan proses rotasi personel merupakan faktor strategis yang menentukan keberhasilan maupun keberlanjutan inovasi organisasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah operator terlatih serta pergantian pegawai yang tidak diimbangi dengan pembekalan kompetensi telah memengaruhi stabilitas pelaksanaan SILAT. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui distribusi kompetensi, pelatihan berjenjang, dan sistem pengetahuan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan inovasi digital di tingkat desa.

B. Tidak ada Penghargaan atau Insentif bagi Operator SILAT

Konsekuensi dari tidak tersedianya insentif atau penghargaan tercermin dalam minimnya dorongan internal maupun eksternal bagi aparatur untuk menunjukkan perilaku inovatif. Mulgan dan Albury (2003) menegaskan bahwa absennya sistem penghargaan dalam organisasi publik dapat membatasi tumbuhnya kreativitas serta inisiatif individu, karena inovasi membutuhkan dukungan psikologis berupa pengakuan terhadap usaha dan pencapaian pegawai. Ketiadaan dukungan tersebut berpotensi membuat inovasi berhenti pada tahap implementasi awal tanpa keberlanjutan yang kuat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa operator yang mengelola SILAT tidak menerima bentuk apresiasi khusus, baik secara finansial maupun nonfinansial. Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mengungkapkan bahwa saat ini penghargaan atau insentif bagi operator belum tersedia dan baru akan dicanangkan. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara beban kerja tambahan yang ditanggung operator dan penghargaan yang diberikan, sehingga motivasi untuk mempertahankan kinerja optimal berpotensi menurun. Kaur Perencanaan Desa Klopoduwur menyampaikan harapan agar penghargaan dan insentif dapat diberikan, sehingga petugas operator yang mendata Anak Tidak Sekolah (ATS) lebih termotivasi dan mampu menunjang operasional secara maksimal. Hasil uraian penelitian di atas mengindikasikan bahwa sistem penghargaan memiliki peran strategis sebagai penguat motivasi dan stabilitas perilaku inovatif. Pengakuan terhadap kontribusi operator SILAT, baik dalam bentuk insentif material maupun nonmaterial, berpotensi meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan aplikasi dan memperkuat keberlanjutan inovasi digital di tingkat desa. Mekanisme penghargaan yang terstruktur juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, sehingga kapasitas inovasi organisasi dapat berkembang secara lebih konsisten.

SIMPULAN

Implementasi inovasi layanan digital Sistem Informasi Layanan Administrasi Terpadu Pendidikan (SILAT) di Kabupaten Blora menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Penerapan SILAT memberikan dukungan terhadap percepatan layanan administrasi pendidikan, penyederhanaan alur pendataan, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta perangkat desa. Dampak positif juga terlihat pada penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui proses pendataan yang lebih jelas, terarah, dan terukur sehingga langkah tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih cepat. Kualitas dukungan pemerintah dalam kegiatan yang telah dilaksanakan berada pada kategori memadai. Penyediaan sarana dasar, alokasi anggaran, dan pendampingan awal memberikan ruang bagi pengoperasian SILAT pada berbagai tingkatan.



Kolaborasi antara operator sekolah, perangkat desa, dan tim pendamping lapangan mampu memperkuat proses pendataan ATS serta meningkatkan keakuratan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tindak lanjut di lapangan. Pemanfaatan SILAT memberi manfaat bagi masyarakat berupa kemudahan akses layanan administrasi pendidikan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan turut mengungkap masih adanya hambatan dalam proses implementasi. Tingkat pemahaman operator desa terhadap fitur aplikasi masih beragam karena sosialisasi dan pelatihan belum berlangsung secara merata. Kondisi infrastruktur digital yang belum stabil di beberapa wilayah mengurangi kecepatan respons terhadap laporan ATS dari masyarakat. Ketiadaan mekanisme penghargaan yang jelas bagi operator berdampak pada fluktuasi motivasi kerja, terutama pada periode dengan volume tugas tinggi. Upaya penguatan implementasi SILAT memerlukan peningkatan kapasitas operator melalui pelatihan berjenjang, pemantapan pendampingan teknis, serta perluasan cakupan sosialisasi. Penguatan infrastruktur digital pada wilayah desa diperlukan agar proses penginputan dan penanganan laporan berjalan lebih lancar. Penyusunan mekanisme penghargaan bagi pelaksana penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan motivasi dan mendukung budaya kerja inovatif. Rangkaian langkah tersebut berpotensi memperkuat efektivitas pemanfaatan SILAT, meningkatkan kualitas layanan pendidikan daerah, dan mendorong keberlanjutan inovasi secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Albury, M. and. (2003). *Innovation in the Public Sector*. London: Strategy Unit, Cabinet Office.
- Cinar, E., Trott, P., & Simms, C. (2019). A systematic review of barriers to public sector innovation process. *Public Management Review. Public Management Review*, 21(2).
- Dkk, P. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Indrajit, E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. APTIKOM.
- Mahmudah, F. N., Baswedan, A. A. G. R., Usman, H., Mardapi, D., & Putra, E. C. S. (2022). The Importance of Partnership Management To Improve School-To-Work Transition Readiness Among Vocational High School Graduates. *Obrazovanie i Nauka*, 24(5), 64–89.
- Mataji Amirroud, M., Ghaffari, M., Ramezankhani, A., & Soori, H. (2023). Developing and validating an instrument to assess women's empowerment in dealing with domestic violence in Iran: a mixed-methods study protocol. *BMJ Open*, 13(8), 1–7.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2020). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 86(2).
- Mochammad Rozikin. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah: Collaboration and E-Literacy: Key Success Innovation of Local E Goverment. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
- Moolman, B., Tolla, T., Essop, R., Isaacs, N., & Makoae, M. (2023). I felt like I was going to cause conflict. So, I kept quiet ..." (Female child rape victim, 15 years). *Child Abuse and Neglect*.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (Studi kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).



- Nur Laila, F. D., & Habibi, M. M. (2024). Implementasi inovasi layanan digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online) di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(2), 165–179.
- Prihartono, D. (2023). Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era Revolusi Industri 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2).
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Institusi Pemerintahan: E-Government. *Jurnal Fasilkom*, 12(1), 14–19.
- Rahmawati, J. (2024). Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 1(3).
- Raskind, I. G., Shelton, R. C., Comeau, D. L., Cooper, H. L. F., Griffith, D. M., & Kegler, M. C. (2019). A Review of Qualitative Data Analysis Practices in Health Education and Health Behavior Research. *Health Education and Behavior*, 46(1).
- Russo, J. E. (2014). *Decision Making*.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian(2 (Edisi R). In *Pustaka Almaida*.
- Schmieder, C. (2020). Qualitative data analysis software as a tool for teaching analytic practice: Towards a theoretical framework for integrating QDAS into methods pedagogy. *Qualitative Research*, 20(5), 684–702.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Triyono, B. & K. H. (2025). Implementasi aplikasi Mobile City Kudus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kudus. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2).
- Tseng, M. L. (2018). *A Literature Review on Green Supply Chain Management: Trend and Future Challenges*.
- Turner, D., Ting, H., Lim, T. Y., & Tan, K. L. (2021). Applying Qualitative Approach and Analysis in Business Research. *Asian Journal of Business Research*, 11(3).